

PERADILAN ETIKA PEMILU

Pelaksanaan Pemilihan Umum dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika memiliki 2 (dua) aspek secara simultan yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Indikator aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga Pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Sementara itu, aspek substantif, pemilu sejatinya menganut nilai asas luber jurdil dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Salah satu indikator dari aspek substantif adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih. Oleh karena perebutan kekuasaan dalam kontestasi maka peran dan fungsi DKPP sebagai peradilan etik penyelenggara pemilu adalah mengawal dan menjaga kehormatan aparat penyelenggara dan institusi penyelenggaraan untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Sebagai penegak kode etik, DKPP memastikan proses dan hasil tahapan dapat dilaksanakan berdasarkan standar ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penerbit:
Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2-AB)
Jl. Swadaya I No. 11, Rt. 02/01 Duren Sawit, Jakarta Timur
Kode Pos 13440, Telp/Fax (021) 86600163
Email: lp2abpress@gmail.com



Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si.



PERADILAN ETIKA PEMILU

Penguatan Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemilu



Perpustakaan Nasional RI:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Dr. Muhammad, S.I.P., M.Si.

PERADILAN ETIKA PEMILU

Penguatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

Penulis : Muhammad

Editor : Rahman Yasin

Lay Out : Haeriah Rachman

Desain Cover : Haeriah Rachman

ISBN : 978-623-937798-0-3

Penerbit:

Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2-AB)

Jl. Swadaya I No. 11, Rt, 02/01 Duren Sawit, Jakarta Timur

Kode Pos 13440, Telp/Fax (021) 86600163

Email: lp2abpress@gmail.com

Cetakan Pertama, Mei 2020

DAFTAR ISI



Pengantar Penulis	v
Daftar Isi	x
BAB 1 Pendahuluan Suatu Pengantar Menuju Praktik	
Etika Bernegara	1
A. Pengertian dan Tujuan Etika	3
B. Sejarah Perkembangan Pemikiran Etika	7
C. Praktik Etika	10
D. Dimensi Transformasi Etika Bernegara	20
E. Prinsip Dasar Etika Bernegara	24
F. DKPP dan Pemilu Berintegritas	47
BAB 2 Tentang Kajian Buku	57
A. Pengantar	59
B. Efek Peradilan Tertutup	66
C. Keadilan HAM	69
D. Menuju Keadilan Hukum dan Etika	73
BAB 3	
Penangan Pelanggaran Kode Etik Pemilu	77
A. Optimalisasi Peran dan Fungsi DKPP Periode Kedua ..	79
B. Pelanggaran Kode Etik Pemilu	87
C. Landasan Prinsip Dasar Kode Etik Penyelenggara Pemilu	93
D. Landasan Asas Kode Etik Penyelenggara Pemilu	97

BAB 4 Praktik Peradilan Etika Modern	101
A. Penguatan Peran Peradilan Etik DKPP	103
B. Menggerakkan Infrastruktur Peradilan Etik	107
C. DKPP Modal Peradilan Etik Terbuka	111
BAB 5	
Sistem Hukum Beracara di DKPP RI	117
A. Regulasi Penegakan Kode Etik	119
B. Perkembangan Regulasi Internal DKPP	123
C. Perumusan tentang Perilaku Etis	125
BAB 6	
Perkembangan Mekanisme Penyelesaian Pemilihan Umum	135
A. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	137
B. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Sengketa, Tindak Pidana, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	148
C. Penyelesaian Pidana Pemilu	64
D. Peran MK dan Mekanisme Penanganan Sengketa PHPU	169
BAB 7	
Penguatan system Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudan PEMILU Berintegritas	211
A. Sistem Pemilu Demokratis	213
B. Pemilu dan Demokratisasi	215
C. Akuntabilitas Pelaksanaan Pemilu	223
D. Pengawasan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas	227
E. Penguatan Kader Kepemimpinan	239
Daftar Pustaka	255
Indeks	267
Biografi Penulis	270

Daftar Pustaka



Buku

Almond Dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik Dan Demokratisasi Di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Apter, David, *Politik Modernisasi*. Jakarta: Gramedia, 1987.

Asian Development Bank, *Governance : Sound Development Management*, 1999.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

_____, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

_____, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer-Kelompok Gramedia, 2011.

_____, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Pespektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics' & Constitutional Law And Constitutional Ethics'*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

_____, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, *Pedoman*

Pengawasan Pemilu 2009.

- Biro Program Informasi Internasional, U.S. Department Of State, ***Pemilu Amerika Serikat, Sebuah Paparan Singkat***, 2012. Disadur Dari Laman; [Www.Rumahpemilu.Com](http://www.Rumahpemilu.Com).
- Budiardjo, Miriam, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung : Mizan, 2000.
- Cruz, Peter De, *Comparative Law In A Changing World*) Dalam (Terj), Narulita Yusran, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Dahl, Robert, *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1999.
- Diamond, Larry, Juan Linz, Dan Seymour Lipset (Eds.), *Democracy In Developing Countries: Comparing Experiences With Democracy*. Boulder: Lynne Rienner, 1999.
- Diamond, Larry, *The Democratic Revolution*. London: Freedom House, 1992.
- Elkit, J Dan Severson, Journal Of Democracy, Page 8 Dalam Prihatmoto, Joko J. Mendemokratiskan Pemilu, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Guillermo, O'Donnell, Phillipe C. Schmitter, Dan Laurence Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Guillermo, O'Donnell, Dan Phillipe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan Dan Ketidakpastian*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- H. Akbar, Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haris, Syamsuddin, *Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.

- Harjono, Dalam Sambutan Ketua DKPP Dalam Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode Tahun 2019-2020 Dari 34 Provinsi Di Jakarta Pada Tanggal 6 April 2019.
- Harrison, Lawrence, Dan Samuel Huntington, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books, 2000.
- Held, David (Ed.), *New Form Of Democracy*, London: SAGE, 1986.
- _____, *Model Of Democracy*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Hoesein, Arifin, Zainal, *Hukum Dan Dinamika Sosial*, Konsep Dan Teori, Praktik Hukum Pasca Reformasi, CV. Ramzy Putra Pratama, Jakarta, 2014.
- _____, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep Dan Penerapannya*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), 2015.
- _____, *Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta, LP2AB, 2019.
- Huntington, P. Samuel, *Prajurit Dan Negara, Teori Dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- _____, *The Third Wave Democratization In The Late Twentieth*, 2003.
- Husein, Harun, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, Dan Studi Banding*, Jakarta: Perludem, 2014.
- Ismatullah, Dedi, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2010.

- International Institute For Democracy And Electoral Assistance (International IDEA), *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. (Stockholm, International Institute For Democracy And Electoral Assistance), 2002.
- Kelsen, Hans, *General Theory Of Law And State*, Translated By: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961).
- Laporan Kinerja Tahunan (2018) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
- Laporan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Bawaslu RI Tahun 2014.
- Larry Diamond, *Developping Democracy: Toward Concolidation*. Baltimore And London: The John Hopkins University Press, 1999.
- Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Mahfud, MD, Moh, *Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Seminar Nasional, Dalam Keynote Speech, Prosiding, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 24-26 Januari 2012.
- _____, *Konstitusi Dalam Hukum Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajagrafindo, 2012.
- Marilyn Watson Dkk., *"The Child Development Project: Combining Traditional And Developmental Approaches To Values Education"* Dalam Larry P. Nucci (Ed.), *Moral Development And Character Education* (Berkeley, CA: Mccutchan, 1989).
- Mohammad, AS Hikam, *Perkembangan Pemikiran Dan Praktek Demokrasi*, Forum Jakarta, 2008.

_____, Forum, Perkembangan Pemikiran Dan Praktek Demokrasi. 2008.

Naskah Kompherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku V, Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.

Panggabean, Henry P. *Tanggungjawab Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan Press, 2009.

Peters, B.Guy, *The Politics Of Bureaucracy*, London : Routledge, 2000.

Prasetyo, Teguh, *DKPP RI: Penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Jakarta: Rajagrafindo Bekerjasama Dengan DKPP RI, 2019.

Rauf, Maswadi, *Teori Demokrasi Dan Demokratisasi*, Dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fisip UI, Jakarta: UI Salemba, 1997.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Rohaniah, Yoyoh Dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing, 2015.

Rosenbloom, David H., 1971, *The Constitution As A Basis For Public Administrative Ethics*, Kumpulan Tulisan Yang Dihimpun Dalam “Readings”, *Ethics In Public Office*, Oleh Professionals Educational Foundation Of The Visyas, INC, Dalam A Master’s Degre In Fiscal Administration, 1994.

Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Santoso Topo, Dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia:*

- Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Scumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism, And Democracy*, New Nork: Jarper, 1947.
- Seno, Oemar, Adji, *Peradilan Bebas & Contempt Of Court*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Sofyan, Andi, Dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sorensen, Georg, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP, Semarang Press, 1995.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta: 1999.
- Thaib, Dahlan, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008.
- Thamrun, John, *Perselisihan Prayudisial: Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ventriss, Curtis, *Reconstructing Government Ethics: A Public Philosophy Of Civic Virtue*.
- Wahid, Abdul, Dan Moh. Muhibbin, *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Wiko, Garuda, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, Dalam (Ed.), Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pres.

Zainal, Abidin, Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Gazali*, Penerbit, Bulan Bintang, Jakarta (Tanpa Tahun).

Makalah/Jurnal/Majalah

Harjono, Dalam Kuliah Etika Ketua DKPP, Majalah DKPP, Edisi Agustus 2018, Menegakkan Kedaulatan Rakyat Untuk Pemilu Berintegritas.

Jimly Asshiddiqie, Pemilu 2014 Menjadi Model Sistem Demokrasi Beretika, Disampaikan Pada Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2014 Se-Sumatera, Diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri, Di Medan, Hari Kamis, Tanggal, 5 September 2013,

_____, Pengenalan Tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI), Sistem Penegakkan Etika Lembaga Perwakilan, Dengan Tema: Urgensi Etika Lembaga Perwakilan, Dengan Peserta Delegasi Anggota Badan Kehormatan Provinsi Dari 33 Provinsi Di Seluruh Indonesia, Utusan Pengajar Dari Berbagai Perguruan Tinggi Pada Bidang Ilmu Hukum Dan Etika Se-Jabodetabek, Bertempat Di Hotel Crown, Jalan Gatot Subroto, Pada Hari Senin (18/4/2016).

Marzuki, Laica H.M. Kedaulatan Rakyat Dan Konstitusionalisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Vol. I, No. I, Oktober 2008.

Mahfud, Moh, MD, Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi, Dalam Makalah Pada Kuliah Perdana Program Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada, Senin, 17 September 2012
Di Gedung Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta.

Muhammad, Membantu Terwujudnya Pengawasan Pemilu, Dalam (Ed), Nur Hidayat Sardini Dan Gunawan Suswanto, 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2016.

Internet Dan Peraturan Perundang-Undangan

Internet

<https://dkpp.go.id/dr-harjono-integritas-profesionalitas-kapabilitas-adalah-nilai-yang-harus-dijunjung-tinggi/>

<https://dkpp.go.id/dr-harjono-penyelenggara-pemilu-jagalah-kepercayaan-masyarakat/>

<https://dkpp.go.id/ketua-dkpp-penyelenggara-pemilu-harus-independen-dan-berintegritas/>

<https://dkpp.go.id/prof-muhammad-paparkan-lima-syarat-pemilu-berintegritas-di-acara-bicoipg-2019/>

<https://dkpp.go.id/prof-muhammad-pemilu-berintegritas-diawali-dari-penyelenggara-pemilu-yang-berintegritas/>

<https://mkri.id/index.php?page=web.mahkamah&menu=2>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/ketua-bawaslu-ri-pemilu-demokratis-harus-memenuhi-empat-syarat>

<https://www.komisiyudisial.go.id/>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://www.suara.com/news/2018/09/03/172444/dk-pp-kpu-dan-bawaslu-akan-bertemu-bahas-bacaleg-eks-koruptor>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD).
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 14 Tahun 2008
Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Kosntitusi Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

INDEKS



A

A Public Philosophy
Of Civic Virtue, 113,
114, 260
Abdul Wahid, 89, 90
Accountability, 73, 225
Adil, 5, 6, 11, 17, 18, 22,
27, 31, 32, 40, 41, 43,
44, 46, 70, 76, 81, 96,
97, 98, 99, 109, 115,
127, 128, 155, 175,
214, 217, 219, 229,
231, 234, 235, 249
Akuntabilitas, 12, 35, 86,
97, 215, 223, 224, 225,
226, 227, 240, 249,
253
Al Gazali, 10, 17, 261
Amandemen, 169, 171,
233
Amerika Serikat, 21, 22,
43, 45, 111, 113, 169,
180, 256

Aristoteles, 4, 9, 24, 213
Australian National
University, 178

B

Bandung, 70, 170, 171,
223, 256, 257
Betrand Russel, 8
Bulan Bintang, 10, 261

C

Civil And Political Rights,
70
Clean Government, 11,
73, 74
Code Of Conduct, 11
Code Of Ethic, 11
Constitutional Court In
Asian Cases, 178
Constitutional
Democracy, 175

D

David H. Rosenbloom,

111

De Vos,, 60

Democritus, 9

DKPP, 7, 19, 31, 33, 34,
35, 36, 40, 47, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 68, 72,
79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 91, 93,
94, 103, 106, 109, 111,
112, 113, 115, 119,
120, 121, 122, 123,
124, 125, 127, 128,
129, 130, 131, 133,
137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 152,
156, 231, 241, 242,
243, 244, 246, 249,
250, 251, 252, 253,
256, 259, 261, 265,
273

E

Efektivitas, 90, 167, 249

Efisien, 25, 29, 34, 67,
74, 108, 225, 226, 227,
238

Electoral Integrity, 53, 54,
253

Equality, 61, 214, 215,
253

Etika, 3, 4, 6, 7, 9, 10,

12, 18, 19, 20, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 36,
60, 73, 89, 93, 94, 95,
103, 109, 114, 115,
122, 132, 230, 247,
255, 259, 260, 261,
263

Etika., 3, 4, 8, 21, 22, 25,
34, 59, 69, 74, 108,
240, 253

F

Fieldston Lower School,
21

Freedom, 214

G

Galileo, 10

Garuda Wiko, 175

Ginsburg, 178

Gloria Frey, 22

Good Governance., 11

Groningen, 60

Guardian Of The
Constitution, 169

Gunawan Suswantoro,
7, 262

H

Hans Kelsen, 43, 46, 70,
73, 170, 180, 181

Harjono, 31, 36, 80, 125,
130, 246, 247, 249,
251, 252, 256, 261
Henry C. Link, 10
Henry P. Panggabean,
108, 109
Hitler, 10
Homo Homini Lipus, 175
Human Right, 72

I

Indonesia, 5, 6, 7, 11, 12,
14, 18, 19, 25, 26, 27,
28, 31, 33, 36, 38, 40,
41, 43, 44, 47, 50, 51,
54, 60, 61, 62, 65, 68,
70, 71, 72, 80, 81, 82,
83, 86, 89, 95, 96, 105,
108, 109, 112, 115,
119, 123, 124, 138,
154, 156, 158, 162,
164, 166, 168, 170,
171, 174, 175, 177,
178, 179, 181, 182,
189, 191, 194, 202,
205, 208, 214, 220,
221, 227, 231, 232,
234, 239, 245, 246,
255, 256, 257, 259,
260, 261, 262, 263,
264, 265, 272, 273
Infra-Structure, 6, 19,

107, 110
Integritas, 7, 33, 35, 50,
53, 54, 60, 67, 69, 76,
86, 94, 106, 128, 132,
166, 229, 235, 245,
251, 252, 253, 262
Inteliding Tot De Ethiek,
60
International Couvenant,
72
International Couvenant
An Economic, 72

J

Jakarta, 7, 10, 13, 38, 39,
40, 46, 47, 51, 68, 72,
91, 93, 105, 122, 125,
127, 129, 131, 138,
139, 170, 172, 173,
175, 181, 214, 219,
220, 227, 239, 246,
255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262
Jimly Asshiddiqie, 6, 7,
19, 55, 64, 72, 122,
125, 170, 230, 261,
262, 272

K

Kepemimpinan, 23, 27,
37, 48, 103, 125, 126,

215, 221
Khalifah, 213
Kode Etik, 5, 18, 33, 35,
50, 68, 79, 82, 87, 93,
94, 95, 97, 106, 119,
120, 122, 124, 125,
129, 130, 137, 138,
140, 141, 142, 145,
146, 147, 241, 244,
253, 259, 265
Komisi Yudisial, 20, 63,
64, 65, 67, 112, 124
Korea Selatan, 170
KPU, 7, 33, 40, 50, 52,
53, 54, 79, 81, 82, 83,
87, 88, 93, 94, 106,
110, 112, 119, 120,
121, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129,
131, 133, 140, 145,
146, 148, 149, 151,
152, 153, 155, 157,
158, 160, 162, 176,
179, 182, 183, 184,
186, 188, 197, 198,
199, 201, 221, 229,
231, 232, 233, 242,
244, 245, 246, 247,
249, 250, 251, 253

M

Mahfud MD., 25, 26, 39,

181
Marilyn Watson, 22, 23,
258

N

Nur Hidayat Sardini,
7, 262

O

Organized Crime., 14
Orthos Logos, 15

P

Panwaslu, 6, 51, 140,
149, 150, 155, 160,
163, 232, 233
Pemilu, 6, 7, 19, 30, 33,
35, 36, 37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 49,
50, 51, 53, 54, 59, 60,
62, 68, 70, 71, 79, 80,
81, 82, 83, 85, 86, 87,
93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 106, 112, 119, 120,
122, 123, 124, 129,
130, 137, 140, 143,
146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157,
158, 162, 163, 164,
165, 167, 168, 180,

182, 184, 185, 186,
187, 189, 191, 193,
196, 199, 202, 204,
208, 213, 215, 218,
219, 220, 221, 222,
223, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240,
241, 244, 246, 249,
250, 251, 252, 253,
255, 256, 257, 258,
259, 261, 262, 263,
265, 272, 273
Plato, 5, 9, 10, 13, 18, 23

Pra-Socrates, 8
Pythagoras, 8

T

Ta Etha, 4

W

Wet Matigheid Bestuurt,
15

Z

Zainal Arifin Hoesein, 11,
13, 39, 43, 46, 70, 231,
239

Kalla, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ia Mengangkat Tema: *“Menwujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum Yang Berkualitas Dan Berintegritas Melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum”*.

Berbagai Jabatan Strategis Sudah Pernah Diemban Muhammad. Ia Pernah Menjabat Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar 2010-2012, Menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2009, Menjadi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Tahun 2012-2017 Dengan Perolehan Dukungan Suara Terbanyak Di Komisi 2 DPR RI Saat Itu, Dan Berkat Kerja Keras Dan Profesionalismenya Yang Bagus Dimata Public Ini Kemudian Menghantarkan Dirinya Dipercaya DPR RI Menjadi Anggota DKPP RI 2017-2022.

Muhammad Pernah Mendapat Penghargaan Satyalancana Karya Satya X Yang Menandai Kesetiiaannya Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Empat Hari Menjelang Peringatan Kemerdekaan Indonesia Ke-70, Presiden Joko Widodo Menganugerahi Muhammad Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Di Istana Presiden. Penghargaan Itu Diberikan Bagi Mereka Yang Dianggap Berjasa Di Bidang Sosial, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Serta Bidang Lain Yang Bermanfaat Bagi Bangsa Dan Negara.*